

ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL, DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA KOTAMOBAGU

Andry Mokoginta¹, Daisy S.M. Engka², Mauna Th. B. Maramis³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado

E-mail: andry.muafa@gmail.com, daisyengka@unsrat.ac.id, maunamaramis@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Belanja modal adalah salah satu jenis pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana sumber dananya dapat berasal dari transfer Pemerintah Pusat ke daerah berupa dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dengan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh empat variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Dimana didapati secara parsial variabel belanja modal, berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, secara parsial dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya belanja modal, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

ABSTRACT

Capital expenditure is a type of expenditure in the Regional Revenue and Expenditure Budget where the source of funds can come from transfers from the Central Government to the regions in the form of balancing funds consisting of Revenue Sharing Funds, General Allocation Funds and Special Allocation Funds with the intention of increasing economic growth which will have an impact on improving social welfare.

In this study, multiple regression analysis was used to determine how much influence the four independent variables had on the dependent variable. Where it is found partially that the capital expenditure variable has a significant negative effect on economic growth, partially profit-sharing funds, general allocation funds, and special allocation funds have a positive and significant effect on economic growth. Furthermore, capital expenditure, profit-sharing funds, general allocation funds, and special allocation funds simultaneously affect economic growth.

Keywords: *Economic Growth, Capital Expenditures, Profit Sharing Funds, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds.*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus pada suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik. Pembangunan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan nasional yang diakibatkan adanya pertumbuhan penduduk yang selalu bertambah dan disertai dengan adanya perubahan dalam struktur perekonomian suatu negara (Rustan, 2019).

Perekonomian suatu negara dapat dikatakan sehat apabila pertumbuhan ekonominya stabil serta cenderung menuju ke arah yang positif. Perekonomian negara tersebut dianggap mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Atau dengan kata lain suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan produk nasional bruto (PNB, GNP) riil di negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan

barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno Sadono, 2002). Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan di ketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah menunjukkan adanya kegiatan ekonomi yang mampu memberikan tambahan pendapatan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhannya bisa dilihat dalam skala kuantitatif dan diukur dengan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam prakteknya pembangunan ekonomi suatu daerah berkaitan erat dengan potensi ekonomi dan karakteristik yang dimiliki oleh daerah serta adanya keterkaitan (linkage) kegiatan ekonomi antar daerah sekitarnya.

Menurut Todaro dan Smith (2004) terdapat tiga faktor atau komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal (capital accumulation), pertumbuhan penduduk (growth in population), dan kemajuan teknologi (technological progress). Sedangkan menurut Robert J. Gordon (2016), pertumbuhan Global Gross Domestic Product (GDP) suatu negara dipengaruhi beberapa factor, antara lain faktor akumulasi modal, produktivitas sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan politik, kewirausahaan dan produk baru, perubahan struktur perekonomian, dan factor lingkungan (wabah penyakit, bencana alam, perubahan iklim akibat pemanasan global) serta keterbatasan sumber daya dan energi.

Hal ini sejalan dengan kondisi perekonomian global saat ini yang diwarnai dengan pandemi Covid-19 dan telah menimbulkan dampak luar biasa (extraordinary) terhadap kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan. Upaya penanganan kesehatan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 telah menyebabkan terbatasnya mobilitas dan kegiatan ekonomi sehingga meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan dan gelombang pertumbuhan ekonomi yang kontraktif di dunia. Begitu pula dengan keadaan perekonomian nasional saat ini.

Pendahuluan menguraikan latar belakang permasalahan yang diselesaikan, isu-isu yang terkait dengan masalah yg diselesaikan, ulasan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yg relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Tabel 1

Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Kotamobagu Tahun 2011 - 2021

TAHUN	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA (%)	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI SULAWESI UTARA (%)	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA KOTAMOBAGU (%)
2011	6,17%	6,17%	6,49%
2012	6,03%	6,86%	6,96%
2013	5,56%	6,38%	7,06%
2014	5,01%	6,31%	6,70%
2015	4,88%	6,12%	6,52%
2016	5,03%	6,16%	6,63%
2017	5,07%	6,31%	6,70%
2018	5,17%	6,01%	6,67%
2019	5,02%	5,66%	6,16%
2020	-2,07%	-0,99%	0,20%
2021	3,69%	4,16%	4,20%

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Pemberian otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah tersebut dalam membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah setiap pemerintah daerah perlu memberikan peningkatan terhadap pelayanan dan kesejahteraan masyarakatnya secara demokratis, berkeadilan dan berkelanjutan (Firda Monica dkk, 2022).

Seiring dengan adanya pelimpahan kewenangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diikuti pula dengan adanya dana perimbangan yang diberikan kepada daerah yang sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana perimbangan yang bersumber dari APBN diberikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dana perimbangan yang diberikan kepada daerah terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Sedangkan Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Perkembangan Dana Perimbangan di Kota Kotamobagu cenderung meningkat setiap tahunnya, sampai dengan adanya penurunan dana transfer secara nasional dari Pemerintah Pusat ke Daerah pada tahun 2020 diakibatkan adanya konsentrasi anggaran kesehatan dan jejaring sosial untuk penanganan Covid-19 yang melanda Indonesia. Dampak dari pandemi yang ditimbulkan sangat luar biasa, tidak hanya berdampak bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan Pemerintah Pusat memiliki peranan penting dalam penanganan dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 terutama dari sisi ekonomi. Berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Termasuk kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang diarahkan untuk penanganan Covid-19 dan PEN. Salah satunya melalui kebijakan melakukan *refocusing* alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam hal penanganan pandemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya baik dari sisi perekonomian maupun perlindungan social.

Tabel 2

Perkembangan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil di Kota Kotamobagu Tahun 2011 – 2021

Tahun	DAU (Rp)	DAK (Rp)	DBH (Rp)
2011	223.014.565.000	27.506.300.000	17.397.735.776
2012	270.246.978.000	24.267.000.000	16.719.096.991
2013	311.773.832.000	34.342.900.000	18.056.687.061
2014	333.000.351.150	37.428.140.000	18.622.320.508
2015	354.997.037.000	90.603.450.000	13.461.636.883
2016	382.638.269.000	149.256.361.575	16.340.748.409
2017	375.916.545.000	132.935.633.173	15.445.021.658
2018	376.388.719.000	171.048.865.141	16.261.701.610
2019	397.656.494.000	122.847.203.288	14.958.773.479
2020	359.457.903.000	96.063.346.092	15.474.170.754
2021	353.039.596.000	73.752.327.509	30.925.593.137

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu

Pembentukan modal juga mempengaruhi kesejahteraan suatu bangsa dalam pemenuhan segala sesuatu yang diperlukan oleh penduduk yang terus menerus bertambah. Pembentukan

modal adalah sumber investasi pemerintah yang dalam pelaksanaannya lebih ditujukan untuk pengelolaan sumberdaya alam secara tepat dan pendirian berbagai jenis industri, maka tingkat pendapatan bertambah dan berbagai macam kebutuhan rakyat terpenuhi. Masyarakat pun dapat menikmati berbagai macam komoditi dengan peningkatan konsumsi, standar hidup meningkat, juga kesejahteraan ekonomi (Jhingan, 2000 : 399). Suatu daerah otonom dapat dikatakan baik apabila mampu melaksanakan investasinya dari belanja yang dianggarkan secara tepat (Koswara dalam Iqba,dkk, 2020).

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal adalah salah satu jenis pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperbanyak kapitalisasi aset tertentu dan menambah manfaat dari aset lebih dari satu periode akuntansi dengan ketentuan pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Belanja modal di Kota Kotamobagu kurun waktu 11 (sebelas) tahun terakhir cenderung bervariasi. Belanja modal terbesar ada pada tahun 2016 dan belanja modal yang terkecil di Kota Kotamobagu pada tahun 2021.

Tabel 3

Data Belanja Modal di Kota Kotamobagu Tahun 2011-2021

Tahun	Belanja Modal (Rp)
2011	116.579.899.064
2012	87.533.462.069
2013	116.259.282.955
2014	135.515.252.358
2015	140.782.667.079
2016	229.586.038.018
2017	197.781.059.966
2018	172.179.905.946
2019	122.847.203.288
2020	103.502.462.900
2021	86.420.153.185

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu

Besaran alokasi Belanja Modal setiap tahun di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara akuntansi berakibat pada meningkatnya nilai aset yang tercatat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuan kepemilikan sebuah aset bagi pemerintah daerah adalah dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat (bangunan kantor pemerintah) maupun memperlancar aktivitas roda perekonomian (infrastruktur jalan, jembatan, irigasi). Bahkan pada saat belanja modal tersebut direalisasikan anggarannya maka secara langsung memberikan dampak pada bergerakinya sektor riil di masyarakat, yaitu terserapnya tenaga kerja, bahan baku produksi, maupun bergerakinya sektor- sektor jasa di wilayah tersebut.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Belanja Modal secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu?
2. Apakah Dana Bagi Hasil secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu?
3. Apakah Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu?
5. Apakah Belanja Modal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu?

Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu?
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu?
3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu?
4. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu?
5. Untuk menganalisis apakah Belanja Modal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu?

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pihak baik untuk pembangunan maupun untuk dunia pendidikan:

1. Manfaat bagi Pemerintah. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat maupun tambahan ilmu bagi pemerintah dalam membuat keputusan maupun kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu.
2. Manfaat bagi Masyarakat. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu.
3. Manfaat bagi Peneliti. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan informasi mengenai variabel apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan Teoritis

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut Simon Kuznets dalam Todaro (2003) adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang, dari negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas ditentukan oleh kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional dan ideologis terhadap tuntutan keadaan yang ada. Todaro (2003) menyampaikan ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara yaitu:

1. Akumulasi modal (*capital accumulation*), yang meliputi bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia;
2. Pertumbuhan penduduk (*growth in population*), yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja;
3. Kemajuan teknologi (*technological progress*), yang dianggap sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting dan dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: (a) kemajuan teknologi yang bersifat netral; (b) kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja; (c) kemajuan teknologi yang hemat modal.

Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses, karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya.

Definisi Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan data dan informasi dasar tentang kegiatan ekonomi suatu daerah. Menurut Sjafrizal (2014:25) secara definitif, PDRB tersebut pada dasarnya adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pada

suatu daerah pada periode tertentu. Dewasa ini, data PDRB ini sudah tersedia hampir seluruh daerah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setempat di setiap tahunnya. Dalam hal penyusunan PDRB, dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Faktor-Faktor Yang Menentukan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2019) ada beberapa faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi yaitu: (1) Tanah dan Kekayaan Alam Lainnya; (2) Jumlah dan Mutu dari Penduduk dan Tenaga Kerja; (3) Barang-Barang Modal dan Tingkat Teknologi; (4) Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat.

Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Menurut Harrod-Domar (R.F. Harrod dan Evsey Domar) perlu adanya pembentukan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh (steady growth). Semakin banyak modal maka produksi barang dan jasa juga semakin banyak. Jadi menurut teori ini ada syarat agar perekonomian negara dapat berkembang secara jangka panjang (steady growth).
2. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan (entrepreneurship). Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha, yang mana kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat yang mampu melihat peluang untuk membuka usaha baru dan perluasan usaha, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya.
3. Menurut Robert Solow, dalam jangka panjang tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Artinya semakin tinggi tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Solow juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan dengan 4 (empat) faktor utama yaitu manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil (output).

Teori Keuangan Daerah

Menurut Mamesah dalam Halim (2004: 18), Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Adapun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, definisi dari Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Menurut Halim (2004:20), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik (BUMD).

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Adapun beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan daerah.

Konsep Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah, dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan.

Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat berdiri di bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenangnya masing-masing. Hal ini berarti bahwa seiring dengan berjalannya otonomi daerah, maka dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah mulai berkurang dan yang menjadi sumber utama pembiayaan daerah adalah pendapatan dari daerah sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa dana perimbangan terdiri atas (1) dana bagi hasil (DBH), (2) dana alokasi umum (DAU), (3) dana alokasi khusus (DAK). Ketiga macam dana perimbangan tersebut merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan saling melengkapi dan mengisi. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.

Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Ketika Daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai Urusan Pemerintahan dan khususnya Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen Dana Alokasi Khusus untuk membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014).

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022).

Dana Bagi Hasil dilaksanakan dengan prinsip menurut sumbernya, dalam arti bahwa bagian daerah atas penerimaan yang dibagihasikan didasarkan atas daerah penghasil. Prinsip tersebut berlaku untuk semua komponen Dana Bagi Hasil, kecuali Dana Bagi Hasil perikanan yang dibagi sama rata ke seluruh kabupaten/kota. Selain itu, penyaluran Dana Bagi Hasil baik pajak maupun sumber daya alam dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

Dana Bagi Hasil terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil sumber daya alam. Dimana Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan serta cukai hasil tembakau merupakan komponen dari Dana Bagi Hasil Pajak. Sedangkan Dana Bagi Hasil sumber daya alam terdiri dari kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi dan perikanan.

Menurut Putra, dkk (2015) Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari transfer dana yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang. Dana tersebut kemudian dialokasikan kepada daerah-daerah berdasarkan prinsip by origin, dimana daerah penghasil mendapat lebih banyak dana.

Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat Dana Alokasi Umum adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.

Dana Alokasi Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah agar mengurangi ketimpangan kemampuan

keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dimana pembagian Dana Alokasi Umum pada tiap-tiap daerah, dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1 (satu) tahun anggaran yaitu hasil perhitungan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan potensi pendapatan daerah.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022).

Menurut Halim (2014) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pengertian Belanja Modal

Belanja Modal menurut Halim (2008: 101) merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal adalah bagian dari belanja pemerintah yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tujuan kepentingan masyarakat.

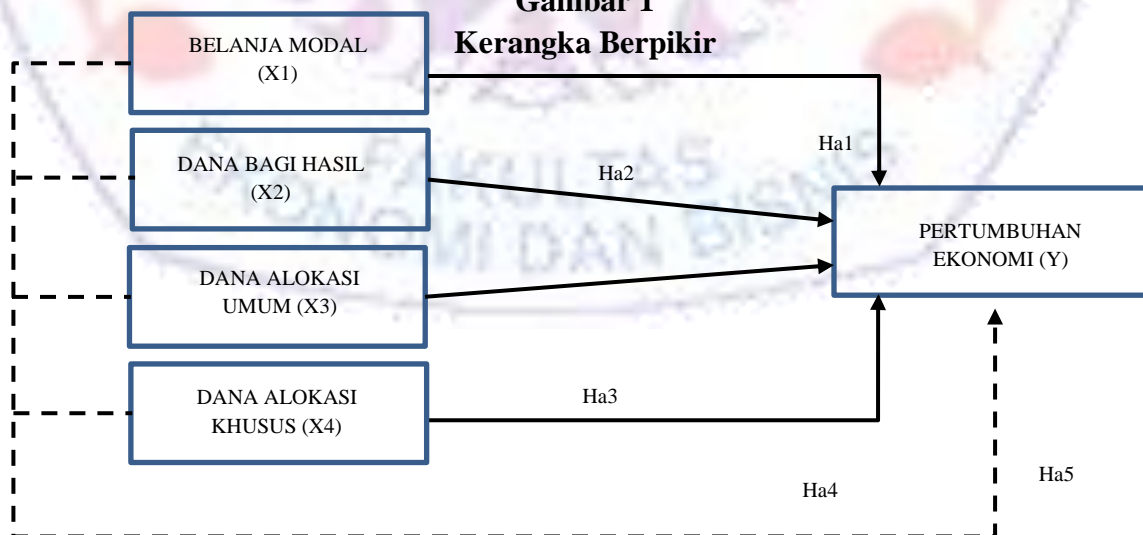
Menurut Darise (2008 : 141), Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Pengertian belanja modal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, belanja modal untuk perolehan peralatan dan mesin, belanja modal untuk perolehan gedung dan bangunan, belanja modal untuk perolehan jalan irigasi dan jaringan, serta belanja modal untuk perolehan aset tak berwujud dan fisik lainnya.

Kerangka Pikir

Gambar 1
Kerangka Berpikir



Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang ada, maka dapat disajikan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ho1 : Diduga tidak terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan dari Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.

- Ha1 : Diduga terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan dari Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.
- Ho2 : Diduga tidak terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan dari Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.
- Ha2 : Diduga terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan dari Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.
- Ho3 : Diduga tidak terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan dari Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.
- Ha3 : Diduga terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan dari Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.
- Ho4 : Diduga tidak terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan dari Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.
- Ha4 : Diduga terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan dari Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.
- Ho5 : Diduga tidak terdapat pengaruh simultan yang signifikan dari Belanja Modal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.
- Ha5 : Diduga terdapat pengaruh simultan yang signifikan dari Belanja Modal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini dibatasi dengan menganalisis data sekunder kuantitatif. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro, 1999). Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan data yang sebenarnya. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Kota Kotamobagu dengan waktu penelitian tahun 2011-2021.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan penulis adalah Data Belanja Modal, Data Dana Bagi Hasil, Data Dana Alokasi Umum, dan Data Dana Alokasi Khusus serta Data Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.

Sumber data diperoleh dari berbagai sumber antara lain, Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu serta jurnal-jurnal ilmiah. Penulis juga melakukan studi literature untuk mendapatkan teori yang mendukung penelitian, dimana referensi studi kepustakaan diperoleh melalui jurnal-jurnal penelitian terdahulu.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkapkan atau menjangkau informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian (Sujarweni, 2019:93). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1) Studi Pustaka; dan (2) Riset melalui Internet.

Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Variabel Independen (X)

1. Belanja Modal (X1) yang digunakan dalam penelitian ini adalah alokasi belanja modal pemerintah kota Kotamobagu tahun 2011 sampai dengan 2021 yang diukur dengan rupiah.

2. Dana Bagi Hasil (X2) yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat kepada pemerintah kota Kotamobagu Tahun 2011 sampai dengan 2021 yang diukur dengan rupiah
3. Dana Alokasi Umum (X3) yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum Pemerintah Pusat kepada pemerintah kota Kotamobagu Tahun 2011 sampai dengan 2021 yang diukur dengan rupiah.
4. Dana Alokasi Khusus (X4) yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Khusus Pemerintah Pusat kepada pemerintah kota Kotamobagu Tahun 2011 sampai dengan 2021 yang diukur dengan rupiah

Variabel Dependen (Y)

Pertumbuhan Ekonomi (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah total Produk Domestik Regional Bruto Kota Kotamobagu Tahun 2011 sampai dengan 2021 yang diukur dengan satuan rupiah.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel bebas (independent) terhadap satu variabel terikat (dependen). Teknik estimasi variabel dependen yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) yaitu mengestimasi garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut (Gujarati, 2012).

Model ini mengasumsikan adanya hubungan satu garis lurus/linier antara variabel dependen dengan masing-masing prediktornya. Dalam penelitian ini, rumus yang terbentuk adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon^i$$

Dimana :

Y	=	Pertumbuhan ekonomi (PE)
X ₁	=	Belanja modal (BM)
X ₂	=	Dana Bagi Hasil (DBH)
X ₃	=	Dana Alokasi Umum (DAU)
X ₄	=	Dana Alokasi Khusus (DAK)
α	=	Konstanta / Intercept
β_1 - β_4	=	Koefisien regresi
ε^i	=	error

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan menilai sebaran data pada setiap variabel, baik dependen maupun independent berdistribusi normal atau tidak. Ghazali (2017:145) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Distribusi normal merupakan distribusi peluang untuk sebaran data yang ideal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengujian secara statistik.

Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah hubungan linier antar variabel bebas. Ghazali (2017:71) menyatakan bahwa uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi diantara variabel. Bila ada korelasi yang tinggi diantara variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat menjadi terganggu.

Uji Autokorelasi

Ghazali (2017:121) menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi pada umumnya lebih sering

terjadi pada data time series walaupun dapat juga terjadi pada data cross section. Dalam data time series observasi diurutkan menurut urutan waktu secara kronologis. Maka dari itu, besar kemungkinan akan terjadi interkorelasi antara observasi yang berurutan, khususnya kalau interval antara dua observasi sangat pendek.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Jika varians dari nilai residual antar pengamatan tetap, maka kondisi ini disebut homoskedastis. Akan tetapi jika berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang bersifat homoskedastis.

Uji Signifikansi

Uji t Statistik

Uji t statistik bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian Uji t dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) sesuai dengan pendapat Nugroho (2009).

Dengan kategori pengujian sebagai berikut :

1. $H_0 : \beta = 0$ artinya tidak ada pengaruh signifikansi variabel independent terhadap variabel dependen
2. $H_0 : \beta \neq 0$ artinya ada pengaruh signifikansi variabel independent terhadap variabel dependen

Adapun keputusan hipotesis bisa diterima atau tidak adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini membuktikan bahwa secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini membuktikan bahwa secara parsial variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara simultan (bersama-sama) yang diberikan variabel independen $X_1, X_2, X_3,$ dan X_4 berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Uji F dalam penelitian ini menggunakan probabilitas dengan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$). Pengujian dilakukan dengan level signifikansi 5%. Uji statistic yang digunakan dengan F hitung kemudian membandingkan dengan F table, Nugroho (2009). Dengan kategori pengujian sebagai berikut:

1. $H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ artinya semua variabel independen dan variabel dependen tidak ada pengaruh yang signifikan.
2. $H_0 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 = 0$ artinya semua variabel independen dan variabel dependen saling memiliki pengaruh yang signifikan.

Berikut ini adalah kriteria penentuan uji F :

1. Jika probabilitas (F -statistik) $< 0,05$ maka dikatakan signifikan. Artinya hipotesis diterima yang menunjukkan variabel independen (X_2, X_2, X_3 dan X_4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).
2. Jika probabilitas (F -statistik) $> 0,05$ maka dikatakan tidak signifikan atau hipotesis ditolak. Artinya semua variabel independen (X_2, X_2, X_3 dan X_4) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau goodness of fit digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai dari R^2 berada pada rentang 0-1. Semakin tinggi angka tersebut maka semakin baik model yang dibuat dan sebaliknya semakin rendah angka tersebut maka semakin kecil pengaruh variabel dependent terhadap variabel independent. Dengan kata lain, koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui

berapa persen pengaruh yang diberikan variabel bebas (X) secara simultan terhadap variabel terikat (Y).

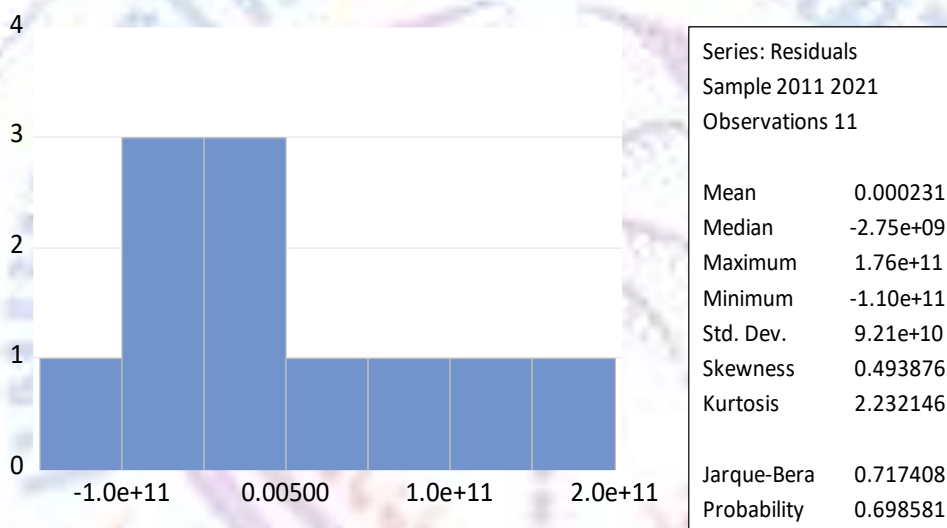
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Untuk menguji data pada penelitian ini terdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan menggunakan uji Jarque Bera test (J-B). Berdasarkan table uji normalitas di atas, nilai probabilitas Jargue-Bera (0,698581) > α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal.

Gambar 2
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Hasil olahan eviews 12

Uji Multikolinieritas

Untuk mendeteksi gejala multikolinieritas dapat melalui uji *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan kriteria pengujian nilai $VIF \geq 10$ terdapat gejala multikolinieritas atau sebaliknya $VIF < 10$ tidak terdapat gejala .

Gambar 3
Hasil Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors
Date: 12/13/22 Time: 17:19
Sample: 2011 2021
Included observations: 11

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
BM	1.580443	25.48257	2.316058
DBH	79.76769	20.48064	1.221670
DAU	1.676167	154.0923	3.314641
DAK	2.577204	20.27540	4.983955
C	1.70E+23	132.2530	NA

Sumber : Olahan data Eviews 12

Dari hasil uji multikolinearitas pada model ini, *Variance Inflation Factor* (VIF) pada variabel independent Belanja Modal (X₁) bernilai 2,316058, Dana Bagi Hasil (X₂) bernilai 1,221670, Dana Alokasi Umum (X₃) bernilai 3,314641, dan Dana Alokasi Khusus (X₄) bernilai 4,983955. Dengan demikian diketahui bahwa setiap variabel independen tidak ada yang memiliki nilai $VIF \geq 10$, artinya dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi pada penelitian ini dilakukan menggunakan Uji Breusch-Godfrey. Dengan dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi menurut Ghozali (2016) adalah sebagai berikut :

1. jika hasil Uji Breusch-Godfrey nilai probabilitasnya $< 0,05$ maka terjadi gejala autokorelasi.
2. Jika hasil Uji Breusch-Godfrey nilai probabilitas $> 0,05$ maka tidak terjadi gejala autokorelasi.

Gambar 4
Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:				
Null hypothesis: No serial correlation at up to 1 lag				
F-statistic	0.523247	Prob. F(1,5)	0.5019	
Obs*R-squared	1.042090	Prob. Chi-Square(1)	0.3073	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID				
Method: Least Squares				
Date: 12/13/22 Time: 17:04				
Sample: 2011 2021				
Included observations: 11				
Presample missing value lagged residuals set to zero.				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
BM	-0.608011	1.556718	-0.390573	0.7122
DBH	5.401335	11.93354	0.452618	0.6698
DAU	-0.697146	1.658219	-0.420419	0.6916
DAK	1.070062	2.233379	0.479122	0.6521
C	1.32E+11	4.67E+11	0.282602	0.7888
RESID(-1)	-0.498844	0.689622	-0.723358	0.5019
R-squared	0.094735	Mean dependent var	0.000231	
Adjusted R-squared	-0.810529	S.D. dependent var	9.21E+10	
S.E. of regression	1.24E+11	Akaike info criterion	54.22514	
Sum squared resid	7.67E+22	Schwarz criterion	54.44218	
Log likelihood	-292.2383	Hannan-Quinn criter.	54.08833	
F-statistic	0.104649	Durbin-Watson stat	2.405276	
Prob(F-statistic)	0.986488			

Sumber : Olahan data Eviews 12

Untuk menguji data pada penelitian ini terdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan menggunakan uji Jarque Bera test (J-B). Berdasarkan table uji normalitas di atas, nilai probabilitas Jargue-Bera (0,698581) $> \alpha$ (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil uji autokorelasi (menggunakan lag 1), dapat dilihat bahwa nilai Breusch-Godfrey probabilitas 0,3073 $> 0,05$. Artinya dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi dalam model penelitian ini dan dapat dilanjutkan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Pada penelitian ini dilakukan uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser. Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi linier Glejser adalah dengan melihat Nilai Probabilitas F-statistic (F hitung). Apabila nilai Prob. F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan apabila nilai Probabilitas F hitung lebih kecil dari dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka terjadi gejala heteroskedastisitas.

Gambar 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas (Glejser)

Heteroskedasticity Test: Glejser
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.171490	Prob. F(4,6)	0.4099
Obs*R-squared	4.823671	Prob. Chi-Square(4)	0.3059
Scaled explained SS	2.631618	Prob. Chi-Square(4)	0.6212

Test Equation:
Dependent Variable: ARESID
Method: Least Squares
Date: 12/13/22 Time: 17:26
Sample: 2011 2021
Included observations: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.19E+11	1.86E+11	2.251651	0.0653
BM	-0.729801	0.567914	-1.285056	0.2461
DBH	-6.594901	4.034654	-1.634564	0.1533
DAU	-0.595885	0.584859	-1.018852	0.3476
DAK	0.797641	0.725216	1.099867	0.3135

R-squared	0.438516	Mean dependent var	7.00E+10
Adjusted R-squared	0.064193	S.D. dependent var	5.55E+10
S.E. of regression	5.37E+10	Akaike info criterion	52.55358
Sum squared resid	1.73E+22	Schwarz criterion	52.73444
Log likelihood	-284.0447	Hannan-Quinn criter.	52.43957
F-statistic	1.171490	Durbin-Watson stat	2.943651
Prob(F-statistic)	0.409890		

Sumber : Olahan data Eviews12

Setelah dilakukan pengujian, maka hasil yang diperoleh menunjukkan nilai Probabilitas F hitung sebesar 0,4099 atau lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) sehingga, berdasarkan uji hipotesis tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Signifikansi

Gambar 6
Hasil Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: PE
Method: Least Squares
Date: 12/13/22 Time: 18:01
Sample: 2011 2021
Included observations: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
BM	-4.951275	1.257157	-3.938471	0.0076
DBH	21.76014	8.931276	2.436398	0.0507
DAU	3.558507	1.294669	2.748584	0.0334
DAK	5.416065	1.605367	3.373723	0.0150
C	5.97E+11	4.12E+11	1.449976	0.1972

R-squared	0.939955	Mean dependent var	1.98E+12
Adjusted R-squared	0.899925	S.D. dependent var	3.76E+11
S.E. of regression	1.19E+11	Akaike info criterion	54.14285
Sum squared resid	8.47E+22	Schwarz criterion	54.32372
Log likelihood	-292.7857	Hannan-Quinn criter.	54.02885
F-statistic	23.48122	Durbin-Watson stat	2.295177
Prob(F-statistic)	0.000827		

Sumber : Hasil Olahan Eviews 12

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 5,974690 + -4,951275 (X_1) + 21,76014 (X_2) + 3,558507 (X_3) + 5,416065 (X_4) + e$$

Dengan persamaan regresi sebagai berikut :

Berdasarkan hasil regresi di atas, maka dapat diinterpretasikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Nilai koefisien konstanta sebesar 5,974690 bertanda positif, artinya menunjukkan perubahan pertambahan jika variable Belanja Modal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dianggap konstan maka Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) akan meningkat sebesar 5,974690.
2. Nilai koefisien regresi Belanja Modal sebesar -4,951275 bertanda negatif, artinya menunjukkan perubahan penurunan. Dalam hal Belanja Modal mengalami peningkatan sebesar 1 satuan maka akan mengakibatkan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) mengalami penurunan sebesar -4,951275 dengan asumsi variable yang lainnya tetap.
3. Nilai koefisien regresi Dana Bagi Hasil sebesar 21,76014 bertanda positif, artinya menunjukkan perubahan pertambahan jika Dana Bagi Hasil meningkat sebesar 1 satuan, maka akan mengakibatkan Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan sebesar 21,76014 dengan asumsi variable lain tetap.
4. Nilai koefisien regresi Dana Alokasi Umum sebesar 3,558507 bertanda positif, artinya menunjukkan adanya perubahan pertambahan jika Dana Alokasi Umum meningkat sebesar 1 satuan, maka akan mengakibatkan Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan sebesar 3,558507 dengan asumsi variable lain tetap.
5. Nilai koefisien regresi Dana Alokasi Khusus sebesar 5,416065 bertanda positif, artinya menunjukkan adanya perubahan pertambahan jika Dana Alokasi Khusus meningkat sebesar 1 satuan, maka akan mengakibatkan Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan sebesar 5,416065 dengan asumsi variable lain tetap.

Uji t statistic

1. Berdasarkan hasil uji t diatas, diperoleh nilai signifikansi Variabel Belanja Modal (X1) sebesar 0,0076. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, dengan nilai signifikansi X1 $0,0076 < 0,05$, berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Variabel bebas X1 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variable terikat Y pada $\alpha = 0.05$, atau dengan kata lain Belanja Modal berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.
2. Nilai signifikansi Variabel Dana Bagi Hasil (X2) sebesar 0,0507. Jika $\alpha = 0.05$, dan nilai signifikansi X2 $0,0507 > 0,05$ berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel bebas X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variable terikat Y pada $\alpha = 0.05$, atau dengan kata lain Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.
3. Nilai signifikansi Variabel Dana Alokasi Umum (X3) sebesar 0,0334. Jika $\alpha = 0.05$, dan nilai signifikansi X3 $0,0334 < 0,05$, yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel bebas X3 berpengaruh secara signifikan terhadap variable terikat Y pada $\alpha = 0.05$, atau dengan kata lain Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.
4. Nilai signifikansi Variabel Dana Alokasi Khusus (X4) sebesar 0,0150. Jika $\alpha = 0.05$, dan nilai signifikansi X4 $0,0150 < 0,05$, berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel bebas X4 berpengaruh secara signifikan terhadap variable terikat Y pada $\alpha = 0.05$, atau dengan kata lain Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan adanya tingkat signifikansi secara parsial pada Variabel Belanja Modal (X1), Dana Alokasi Umum (X3), dan Dana Alokasi Khusus (X4) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu. Sedangkan Variabel Dana Bagi Hasil (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Uji F

Berdasarkan pada hasil pengolahan data yang menggunakan aplikasi Eviews 12, dapat dilihat Probabilitas (F-statistik) 0,000827. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, Probabilitas (F-statistik) $0,000827 < \alpha = 0.05$, yang artinya semua variable independent atau variable bebas (X1, X2, X3 dan X4) secara bersama – sama atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat Y.

Koefisien Determinasi

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa koefisien determinasi (Adj. R²) sebesar 0.899925 atau 89,9925 %. Hal ini menunjukkan bahwa variable – variable independent dalam hal ini Belanja Modal (X1), Dana Bagi Hasil (X2), Dana Alokasi Umum (X3) dan Dana Alokasi Khusus (X4) secara bersama – sama memiliki pengaruh 89,9925% terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Berdasarkan hasil persamaan regresi analisis pengaruh variable independent (X1, X2, X3, dan X4) terhadap variable dependent (Y) sebagai berikut :

Pengaruh secara bersama-sama/simultan variabel bebas Belanja Modal, Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap variabel terikat Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil uji hipotesis pengaruh variabel bebas Belanja Modal, Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.

Pengaruh secara parsial Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pembentukan atau pengumpulan modal dipandang sebagai salah satu faktor utama di dalam pembangunan ekonomi. Peningkatan pemerintah daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Wong (2004) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Selain itu, bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah (Abimanyu, 2005 dalam Harianto dan Adi, 2007).

Teori menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran dalam bentuk investasi pemerintah dalam membiayai barang – barang publik termasuk belanja modal. Semakin banyak belanja modal akan mempengaruhi peningkatan produktivitas dalam melakukan aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Namun dalam penelitian ini diketahui terdapat kejadian luar biasa/*extra ordinary* dimana nilai belanja modal dan pertumbuhan ekonomi yang sedang mengalami kenaikan setiap tahunnya tiba-tiba harus turun drastis disebabkan adanya Pandemic Covid-19 yang melanda dunia dan berdampak terhadap nilai PDRB Kota Kotamobagu serta alokasi Belanja Modal di Kota Kotamobagu pada dua tahun terakhir penelitian ini. Hal ini yang diduga menjadi penyebab hasil penelitian bertentangan dengan teori. Hasil pengujian hipotesis pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa angka koefisien Belanja Modal (X1) sebesar -4,951275 artinya jika Belanja Modal mengalami peningkatan sebesar 1 satuan maka akan mengakibatkan Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan sebesar -4,951275. Koefisien bernilai negatif antara Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi yang menyatakan bahwa apabila variabel Belanja Modal naik maka pertumbuhan ekonomi akan menurun.

Adapun secara parsial diperoleh nilai probabilitas t hitung atas Variabel Belanja Modal (X1) sebesar 0,0076. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, Nilai probabilitas X1 $0,0076 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa

Variabel bebas X_1 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y pada $\alpha = 0.05$, atau dengan kata lain Belanja Modal berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu.

Walaupun hasil penelitian diatas dianggap bertentangan dengan teori, namun selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Candra Gunantara dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai variabel pemoderasi di Bali. Penelitian tersebut mencakup 9 wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota. Penelitian ini menggunakan data time series, yang digunakan selama periode 2005 - 2011. Jumlah data dalam penelitian ini sebanyak 9 kabupaten/kota x 7 tahun = 63 amatan, kemudian data di outlier sehingga menjadi 58 amatan. Dimana berdasarkan hasil uji simultan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sementara itu, hasil uji parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa Belanja Modal memperlemah pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Belanja Modal sebagai variabel pemoderasi tidak mampu memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal tersebut disebabkan oleh pengalokasian pendapatan daerah untuk Belanja Modal tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga proyek yang dikerjakan bersifat mubasir.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas, dapat dilihat bahwa Dana Bagi Hasil secara parsial berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas $0.057 < \alpha (0.05)$ dan nilai koefisien regresi memiliki hubungan positif 21.76014 artinya menunjukkan bahwa jika Dana Bagi Hasil meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan ikut meningkat. Hal tersebut sesuai dengan teori menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif secara signifikan di Kota Kotamobagu disebabkan tepat sasaran dalam pengalokasian Dana Bagi Hasil di Kota Kotamobagu.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh secara positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas $0.0334 > \alpha (0.05)$ dan nilai koefisien regresi memiliki hubungan positif 3.558507.

Dalam Penelitian ini, Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan di Kota Kotamobagu disebabkan tepat sasaran dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum di Kota Kotamobagu.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas $0.0150 > \alpha (0.05)$ dan nilai koefisien regresi memiliki hubungan positif 5.416065.

Dalam Penelitian ini, Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan di Kota Kotamobagu disebabkan tepat sasaran dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus di Kota Kotamobagu.

Pengaruh Belanja Modal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa secara simultan Belanja Modal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan

secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien determinasi (Adj. R²) sebesar 0.899925 atau 89,9925% menunjukkan bahwa variable – variable independent dalam hal ini Belanja Modal (X1), Dana Bagi Hasil (X2), Dana Alokasi Umum (X3) dan Dana Alokasi Khusus (X4) secara bersama – sama memiliki pengaruh 89,9925% terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel belanja modal, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus jika bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu. Artinya jika variable bebas secara bersama-sama meningkat, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu.
2. Teori menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah termasuk didalamnya belanja modal, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seharusnya semakin banyak belanja modal maka akan mempengaruhi peningkatan produktivitas dalam melakukan aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Namun dalam penelitian ini diketahui terdapat kejadian luar biasa/*extra ordinary* akibat pandemic Covid-19 yang berdampak terhadap nilai PDRB Kota Kotamobagu serta alokasi Belanja Modal di Kota Kotamobagu pada dua tahun terakhir penelitian ini. Kejadian luar biasa inilah yang diduga menjadi penyebab penelitian yang dilakukan penulis bertentangan dengan teori dan berbeda dengan hasil yang seharusnya. Hasil penelitian yang didapati menunjukkan bahwa anggaran belanja modal secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu, artinya jika anggaran belanja modal mengalami peningkatan, maka tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu akan mengalami penurunan.
3. Variabel Dana bagi hasil secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu. Artinya jika dana bagi hasil mengalami peningkatan, maka tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu juga akan mengalami peningkatan.
4. Variabel dana alokasi umum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu. Artinya jika dana alokasi umum mengalami peningkatan, maka tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu juga akan mengalami peningkatan.
5. Variabel dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu. Artinya jika dana alokasi khusus mengalami peningkatan, maka tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu juga akan mengalami peningkatan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat diberikan penulis pada penelitian yaitu sebagai berikut;

1. Pemerintah Daerah diharapkan dapat memanfaatkan dana yang diperoleh dari pendapatan transfer pusat ke daerah baik Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus guna membangun infrastruktur publik yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, agar pembangunan fasilitas publik tidak terkesan mubasir ketika fasilitas yang dibangun ternyata belum dibutuhkan masyarakat/pengadaannya belum mendesak. Selain itu, Pemerintah Daerah sebelum membangun suatu fasilitas publik, hendaknya melakukan studi kelayakan dan analisis investasi publik, agar pekerjaan pembangunan tersebut tidak mangkrak dan mubasir. Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat menjaga dan tetap memperhatikan kelayakan fasilitas publik yang telah dibangun selama ini, agar kualitas fasilitas yang dibangun tetap bagus, terjaga dan terus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pemerintah harus memperhatikan permasalahan sumber daya manusia yang ditugaskan untuk mengelola operasional dari fasilitas yang dibangun, hal ini perlu dilakukan agar tujuan dibangunnya fasilitas publik tersebut dapat tercapai. Dengan adanya pengawasan ekstra dalam pengalokasian anggaran untuk belanja modal agar tepat sasaran diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Alokasi belanja modal tetap diperhatikan dan lebih diarahkan kepada belanja modal infrastruktur yang nantinya akan berguna dalam percepatan pembanguann fasilitas pelayanan publik serta pelayanan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antara daerah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Penulis berharap penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain sehingga diketahui dapat diketahui perkembangan – perkembangan di tahun – tahun mendatang dengan menggunakan model linie dinamik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] **Arsyad Licolin, 1999**, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE, Yogyakarta.
- Nurlan Darise, 2007**, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, PT INDEKS Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2010**, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Todaro, Michael P, 2011**, *Pembangunan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Abdul Halim, 2012**, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Buku Beta, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2018**, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Alfabeta, Bandung.
- Rahmat Solling Hamid, Samsul Bahri, Salju, Muhammad Iqbal, 2020**, *Panduan Praktis Ekonometrika Konsep Dasar dan Penerapan Menggunakan Eviews*, Cv. AA Rizky, Serang-Banten.
- [3] **Wyatt, J. C, dan Spiegelhalter, D., 1991**, *Field Trials of Medical Decision-Aids: Potential Problems and Solutions*, Clayton, P. (ed.): *Proc. 15th Symposium on Computer Applications in Medical Care*, Vol 1, Ed. 2, McGraw Hill Inc, New York.
- [2] **Agus Sunarya Sulaeman, 2019**, *Judul Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, Dan Belanja Modal, Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2019.
- Faridi, Muhammad Zahir, 2011**, *Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth : Evidence From Pakistan*, *Jurnal of social Sciencess (PJSS)* Vol 31. No. 1, pp1-33.
- Feronika, 2017**, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Alokasi Umum Terhadap Belanja Langsung Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Bitung*, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 18, No. 5.
- Ferly Christian Kolinug, 2015**, *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kota Manado*, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 17, No. 2.
- George W. Hammond and Mehmet S. Tosun, 2009**, *The Impact of Local Decentralization on Economic Growth. Evidence from U.S Counties*, IZA Discussion Paper No. 4574 November 2009.
- Lian Arke Mokerowu, 2020**, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara*, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 21, No. 4.
- Putu Candra Gunantara, 2014**, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai variabel pemoderasi di Bali*, *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 7, No. 3 (2014).
- Romi Daniel Tuwo, 2021**, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Minahasa*, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 21, No. 4 (2021).
- [3] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

